



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)* ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Kesimpulan

Salah satu faktor penentu yang mendukung sukses dan tidaknya pelaksanaan kegiatan pengembangan 1 juta ha adalah faktor pendanaan. Jumlah anggaran yang diperoleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan baik dalam rangka pembinaan, pemeliharaan maupun pembukaan kebun baru (pengembangan dan perluasan).

Dari seluruh pencapaian program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Tahun 2013 dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih belum sepenuhnya merefleksikan dan sesuai dengan perencanaan jangka menengah (RKPD dan Renja SKPD), sehingga realisasi program/kegiatan belum dapat dicapai secara optimal.

B. Saran

Untuk peningkatan pencapaian hasil kegiatan dari program yang ada di tahun-tahun berikutnya disarankan agar pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur hendaknya disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya, sehingga realisasi kegiatan dapat dicapai secara optimal. Kegiatan yang tidak terprogram hendaknya terkoordinasi dengan baik antara unit-unit kerja terkait, sehingga tidak membebani anggaran belanja secara signifikan yang berakibat kepada penggeseran anggaran atau kegiatan.